



## MENGUNGKAP GOOD SCHOOL GOVERNANCE DI SEKOLAH ISLAM SHAFTA DALAM PRESPEKTIF AGENCY THEORY

**Muhammad Haidar Raziq<sup>1\*</sup>, Rohmawati Kusumaningtias<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya

Jl. Lidah Wetan, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231

E-mail Author: [muhammad.20057@mhs.unesa.ac.id](mailto:muhammad.20057@mhs.unesa.ac.id)<sup>1\*</sup>, [rohmatikusumaningtias@unesa.ac.id](mailto:rohmatikusumaningtias@unesa.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya agar berguna bagi bangsa (Titik Handayani, 2016). Namun, justru pendidikan merupakan salah satu lembaga yang didalamnya terdapat kasus-kasus kebocoran yang telah menyebabkan berkurangnya anggaran dan dana pendidikan, serta meningkatkan beban biaya yang harus ditanggung masyarakat dan turunya kualitas pendidikan. (Titik Handayani, 2016). Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan bermutu dapat dicapai melalui Good School Governance (Trismanto & Yusak Lestari Diyono, 2014; Erstiawan, 2021). *Good School Governance* akan menghasilkan pengelolaan yang bagus, sehingga kualitas output dari siswa juga akan bagus dan meningkatkan kepercayaan pemilik kepada agen (Erstiawan 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap *Good School Governance* dan teori agensi di Sekolah Islam Shafta sebagai salah satu sekolah islam terbaik di surabaya agar bisa menjadi contoh bagi institusi pendidikan lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelirian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu *Good School Governance* diterapkan dengan baik dan teori agensi yang terjadi membuat kinerja manajemen menjadi efektif.

**Kata Kunci:** *Good School Governance*, Teori Agensi, Manajemen Pendidikan, Kepemimpinan.

### Abstract

*Education is a conscious and planned effort to create a learning atmosphere and learning process so that students can actively develop their potential to have spiritual strength, personality, intelligence and the skills they need to be useful for the nation (Titik Handayani, 2016). However, education is actually one of the institutions in which there are leaks of cases which cause a reduction in education budgets and funds, as well as increasing the cost burden that must be borne by the community and decreasing the quality of education. (Point Handayani, 2016). Therefore, improving the quality of education can be achieved through Good School Governance (Trismanto & Yusak Lestari Diyono, 2014; Erstiawan, 2021). Good school governance will result in good management, so that the quality of output from students will also be good and increase the owner's trust in the agent (Erstiawan 2021). This research aims to reveal Good School Governance and agency theory at the Shafta Islamic School as one of the best Islamic schools in Surabaya so that it can be an example for other educational institutions. The research method used in this research is qualitative with a case study approach. The results of this research are that Good School Governance is implemented well and the agency theory that occurs makes management performance effective.*

**Keywords:** *Good School Governance, Agency Theory, Education Management, Leadership.*

## I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya agar berguna bagi bangsa (Titik Handayani, 2016). Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ditegaskan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Melalui pendidikan dapat diperoleh nilai-nilai kebenaran, iman, akhlak mulia, serta memiliki kompetensi dan profesionalitas sebagai warga negara yang bertanggungjawab, sehingga dapat berupaya menghindarkan diri dari perilaku korupsi. Persoalannya institusi pendidikan termasuk Dinas Pendidikan di tingkat daerah maupun pusat yang diharapkan dapat berperan dalam memerangi korupsi, justru merupakan salah satu lembaga yang didalamnya terdapat kasus-kasus kebocoran yang telah menyebabkan berkurangnya anggaran dan dana pendidikan, serta meningkatkan beban biaya yang harus ditanggung masyarakat dan turunya kualitas pendidikan. (Titik Handayani, 2016).

Rendahnya kualitas pendidikan tersebut terbukti dari data yang dikeluarkan oleh PISA Programme for International Student Assessment (Alifah, 2021) tahun 2018 yang merupakan salah satu dasar rujukan untuk menilai kualitas pendidikan di dunia, untuk menilai kemampuan membaca, matematika dan sains, Indonesia menempati posisi terbawah. Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara dalam kategori kompetensi membaca. Untuk nilai matematika, berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Maka dari itu pendidikan di Indonesia perlu melakukan upaya pengelolaan yang baik agar melahirkan lulusan yang kompeten, berkepribadian baik, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab serta mengurangi tindakan korupsi (Dedi Kusmayadi et al., 2015). Kualitas pendidikan sekolah yang bermutu dapat dicapai melalui Good School Governance (Trismanto & Yusak Lestari Diyono, 2014; Erstiawan, 2021). Good School Governance akan menghasilkan pengelolaan yang bagus, sehingga kualitas output dari siswa juga akan bagus (Erstiawan 2021). Pengelolaan sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pergerakan (actuating), dan penilaian/evaluasi (controlling) terhadap suatu kegiatan supaya mencapai efisiensi dan efektivitas dalam menyelenggarakan pendidikan (PP No 19 Tahun 2005; Khairul akbar et al., 2021).

*Good School Governance* adalah sebuah perangkat untuk membentuk sebuah sekolah dengan tata kelola yang baik, Secara sederhana, *Good School Governance* dapat dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar konsep “*good governance*” dalam sistem dan proses governance pada institusi pendidikan (Pujiono Pujiono & Made Dudy Satyawan, 2011). Prinsip tata kelola yang baik menurut KNKG (2019) diantaranya yaitu independensi, transparansi, akuntabilitas, fairness, dan responsibilitas. Prinsip tersebut memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang mudah dimengerti, dapat meningkatkan kepercayaan dan membangun budaya lingkungan yang baik antara stakeholder dengan agensi. (Erstiawan, 2021). Agen dalam hal ini yaitu kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya kepada pemilik (Erstiawan, 2021). Teori agensi terjadi apabila terdapat ketidakpercayaan terhadap hasil kinerja manajemen dari pemilik, maka untuk memperkuat kepercayaan pemilik dibutuhkan *agency cost* (Jensen & Meckling, 1976). *Cost* yang dikeluarkan oleh pemilik yaitu bertujuan untuk mengawasi kinerja manajemen (Fadhilah, 2013). Pengawasan tersebut

dilakukan agar sekolah tetap berjalan sesuai dengan visi misi, sehingga dapat meningkatkan daya saing sekolah dan dapat menambah jumlah siswa baru untuk keberlangsungan sekolah dan tidak terjadi konflik berkepanjangan(Erstiawan, 2021). Penelitian ini membahas mengenai implementasi *Good School Governance* dan mengurai teori agensi yang terjadi di sebuah sekolah. Prestasi yang dicapai oleh siswa dan penghargaan yang diraih merupakan bukti keberhasilan tata kelola. Dari prestasi dan penghargaan yang telah didapat tersebut, penulis ingin mengetahui praktik tata kelola yang diterapkan oleh Sekolah Islam Shafta dan mengurai teori agensi yang terjadi pada sekolah tersebut. Penelitian ini dilakukan pada Sekolah Islam Shafta Surabaya, didasari oleh prestasi dan penghargaan yang didapatkan, berikut merupakan beberapa prestasi yang dicapai oleh Sekolah Islam Shafta :

Tabel 1. Daftar Prestasi Dan Penghargaan SIS

Prestasi atau Penghargaan	Penyelenggara
Meraih emas dan perunggu di ajang Surabaya Archery Competition	KONI
Mendapatkan <i>Gold Medal</i> dalam Olimpiade Sains	Nasional Global Youth Action#2
Juara 3 Darma Cendekia Law Competition	Universitas Katolik Darma Cendika
Juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah Bioocompact	Unesa
Juara 1 National Essay Competition Research Educational Project 2022	Undip
<i>BEST OF 2015 INDONESIA EDUCATION QUALITY AWARD</i> sebagai <i>The Most Improvement School in Tutoring Education Program of The Year 2015</i>	IDAF
<i>INDONESIA BEST 50 TRUSTED SCHOOL</i> dalam kategori sebagai <i>The Best Favorite Islamic School in Education Quality Excellent of The Year</i>	IAC 2014 3UNO

Sumber: <https://shafta.sch.id/>

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Agensi

Teori keagenan menurut Horne dan Wachowicz (2010:8) merupakan teori ekonomi yang berhubungan dengan sikap prinsipal selaku pemilik perusahaan dan agen mereka yaitu manajer pengelola perusahaan. Pemilik perusahaan menunjuk pihak untuk diangkat sebagai manajer di perusahaan mereka dan menjadi perwakilan mereka di dalam pengelolaan perusahaan. McGuigan, et al. (2008:12) mendefinisikan hubungan keagenan adalah dasar pendelegasian pengambilan keputusan yang berasal dari pemilik perusahaan kepada agen selaku manajer. Segala keputusan yang diambil oleh manajer didasarkan pada tanggung jawabnya dan kepentingan pemilik perusahaan dimana manajer akan membuat keputusan optimal demi kepentingan pemilik perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976:6). Pada teori keagenan ini dapat timbul yang disebut biaya keagenan.

Menurut Ross, et al. (2009:16) biaya keagenan merupakan biaya-biaya akibat dari adanya konflik perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Menurut Jensen dan Meckling (1976:6-7) terdapat tiga jenis biaya keagenan, yaitu monitoring cost, bonding cost, dan residual loss. Untuk mengurangi konflik keagenan, McGuigan, et al. (2008:14) menjelaskan bahwa perusahaan mengeluarkan biaya agensi yang terdiri dari mengeluarkan upah untuk kompensasi dengan cara menyamakan insentif yang didapatkan oleh manajemen dengan bunga yang didapatkan oleh pemegang saham, audit yang dilakukan oleh internal dan dewan pengawas guna memantau sikap dan tindakan manajemen, mengatur perjanjian dan mengasuransikan kewajiban dari penipuan untuk

melindungi pemilik perusahaan dari ketidakjujuran manajer, dan keuntungan yang hilang dari kompleksitas struktur organisasi yang sengaja dirancang untuk membatasi keleluasaan perilaku manajer namun mengurangi respon dalam menangkap peluang. Menurut Godfrey et al. (2010:363) biaya monitoring adalah biaya yang digunakan untuk memantau perilaku manajer. Biaya ini dikeluarkan oleh pemilik perusahaan untuk memantau, mengukur, dan mengamati perilaku manajer. Biaya monitoring dapat berupa biaya audit, biaya penetapan kontrak kompensasi, kontrak penggunaan anggaran dan hutang, dan aturan operasi perusahaan.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas menurut KNKG (2019), adalah bentuk tanggung jawab entitas atau organisasi terhadap kinerjanya. Maka dari itu pengelolaan sebuah organisasi harus benar dan sesuai dengan kepentingan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan. Selain itu, akuntabilitas yang baik akan memudahkan para pemangku kepentingan dalam mendapatkan akses informasi yang dapat dipahami, update, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan informasi (Martinus, 2021). Akuntabilitas membuat lembaga dapat menerima evaluasi dari pihak internal maupun eksternal (Khoirul Wakhid & Rohmawati Kusumaningtyas, 2023). Dalam konteks pendidikan evaluasi dapat dilakukan oleh kepala sekolah maupun yayasan supaya membuat entitas atau organisasi tersebut menjadi lebih baik dan berkualitas (Erstiawan, 2021).

### **Transparansi**

Menurut KNKG (2019) Transparansi merupakan bentuk tata kelola agar sebuah entitas terbuka terhadap informasi yang ada di entitas tersebut, transparansi juga melihat seberapa jauh keterbukaan itu didalam sebuah organisasi. Pada dasarnya sebuah organisasi harus memberikan informasi yang sesuai dan dapat dimengerti oleh stakeholder. Dalam konteks ini, sekolah harus terbuka terkait informasi tentang aktivitas yang dilakukan, seperti pengelolaan keuangan yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, dalam laporan keuangan tersebut harus memberikan informasi terkait perolehan dana, baik dana spp, dana bantuan operasional, atau dana dana lain (Martinus, 2021). Begitu juga dengan pengeluaran dana, sekolah harus memberikan informasi mengenai dana yang keluar untuk keperluan apa saja. Seluruh pengeluaran dan pemasukan harus disampaikan secara jujur dan tidak menutupi apapun. Bentuk lain dari transparansi adalah keterbukaan informasi terkait aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, seperti kegiatan sosial atau kegiatan apapun yang terkait dengan sekolah. Dengan begini para stakeholder dapat mengetahui terkait kegiatan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pendidikan. Penerapan transparansi yang baik akan dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, baik dari siswa, wali murid, atau yayasan (Martinus, 2021).

### **Responsibilitas**

Prinsip dari responsibilitas menurut KNKG (2019) yaitu setiap organisasi wajib mematuhi peraturan undang undang yang berlaku. Bentuk lain dari responsibilitas adalah adanya tanggung jawab kepada masyarakat sekitar atau lingkungan, sehingga keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang dapat terjaga dan juga mendapatkan pengakuan tata kelola yang baik. Tanggung jawab dari sebuah organisasi pendidikan dapat dilihat melalui kualitas seorang guru yang mendidik secara langsung dan melakukan interaksi dengan siswa (Martinus, 2021). Dengan adanya kualitas guru yang baik akan membawa manfaat kepada siswa dalam mata pelajaran yang dipelajari. Dalam mengelola institusi pendidikan, untuk menghasilkan siswa yang berkualitas dibutuhkan usaha untuk

mensinkronisasi kebijakan pemerintah untuk mengikuti aturan, sehingga tidak hanya kualitas guru, tetapi sarana dan prasarana juga berpengaruh dalam menghasilkan output siswa yang berkualitas (Martinus, 2021).

### **Independensi**

Independensi menurut KNKG (2019) adalah sebuah organisasi harus dapat dijalankan dengan independen, yang artinya netral dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Pada dasarnya sebuah organisasi dalam menjalankan operasionalnya, tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain, harus bebas dari berbagai macam kepentingan dan bebas dari intervensi atau tekanan, sehingga stakeholder dalam mengambil keputusan dapat bersifat objektif (Martinus, 2021). Selain itu dalam menjalankan operasional organisasi juga harus memperhatikan anggaran yang direncanakan sebelumnya, mencukupi atau tidak mencukupi. dalam konteks pendidikan, pihak sekolah harus dapat mengambil keputusan secara objektif, dan tidak dipengaruhi oleh pihak pihak yang tidak memiliki kepentingan didalamnya, karena jika terpengaruh secara signifikan dengan pihak lain maka independensi dari sekolah tersebut diragukan. Maka dari itu pengawas juga harus memperhatikan independensi sekolah (Erstiawan, 2021). Berikut merupakan indikator dari independensi (Martinus, 2021).

### ***Fairness***

Definisi kesetaraan dan kewajaran menurut KNKG (2019) yaitu perlakuan lembaga atau organisasi terhadap stakeholder harus sesuai dengan proposinya masing masing. Organisasi atau lembaga wajib memperhatikan berbagai stakeholder yang ada didalam lembaga tersebut. Dalam konteks pendidikan bentuk Fairness yaitu tidak membedakan antara pihak yang dikenal dengan orang lain, semua perlakuan harus sesuai dengan proporsinya masing masing (Martinus, 2021). Selain itu pihak sekolah harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang dalam menyampaikan pendapat atau opini, baik dari kalangan siswa, guru, yayasan atau tenaga kependidikan. Dengan begitu prinsip kesetaraan dan kewajaran akan berjalan dengan baik dan benar. Selain itu pihak agen juga dilarang untuk mendiskriminasi ras, suku, agama dan budaya dari stakeholder maupun siswa di sekolah.

## **III. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Bogdan, R. C., & Taylor, S. J., 1975). Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. (Bogdan, R. C., & Taylor, S. J., 1975). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan sebuah penjelajahan dari suatu kasus atau beragam kasus dari waktu yang cukup lama, dengan pengumpulan data yang mendalam, serta mendapatkan informasi dari berbagai sumber dalam satu konteks (Sri Wahyuningsih, 2013). Dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan dengan lugas dan rinci. Penulis menggunakan teknik sampling purposive untuk menentukan informan dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa sampel yang diambil mewakili populasi yang diteliti dengan baik dan dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017). Kriteria yang terpilih dalam penelitian ini yaitu

1. Anggota Yayasan
2. Kepala Sekolah

3. Siswa
4. Wali Siswa
5. Masyarakat Sekitar

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk memperoleh tingkat keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi yakni mengadakan perbandingan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, triangulasi dalam penelitian ini meliputi triangulasi teori dan triangulasi sumber. Penelitian ini mengimplementasikan model analisis data Miles & Huberman dalam sugiyono (2017) dengan tahapan pengumpulan data yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display data dan *conclusion*.

#### IV. PEMBAHASAN

##### a. Kepemimpinan Manajemen Sekolah yang Efektif dan Transparan

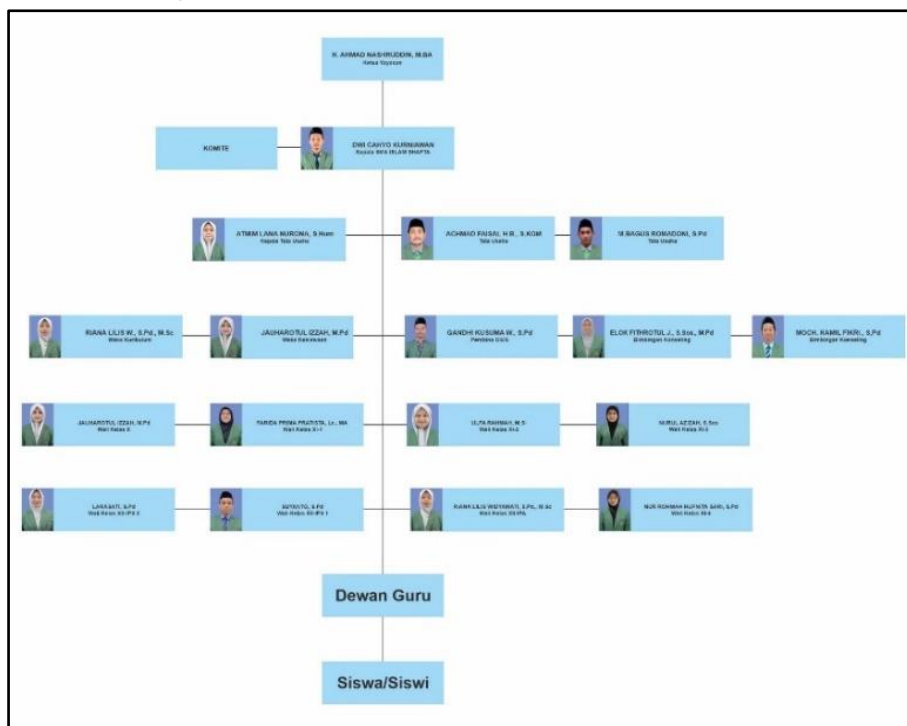
Berdasarkan observasi dan wawancara yang didapatkan penulis mengenai kepemimpinan kepala sekolah di Sekolah Islam Shafta, didapatkan pernyataan sebagai berikut:

“Mekanisme yang kami gunakan itu **evaluasi internal setiap satu tahun sekali, laporan sekolah, sistem *reward and punishment* dan pengawasan dari yayasan atau komite secara langsung**. Ini semua kami lakukan karena Sekolah Shafta selalu ingin **memberikan pelayanan yang baik kepada siswa**. Banyaknya pencapaian prestasi siswa, pemberian fasilitas dan kurikulum yang baik, serta guru yang berkompeten menjadi ukuran kami untuk mengelola sekolah.”

Akuntabilitas menciptakan landasan yang jelas untuk peningkatan terus-menerus dan evaluasi dalam sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, akuntabilitas bukan hanya sekadar kewajiban formal, tetapi juga sebuah komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi para pelajar (Martinus, 2021). Hasil wawancara diatas menunjukkan penerapan mekanisme akuntabilitas yang berfokus pada evaluasi internal, laporan kinerja sekolah, dan pengawasan langsung dari yayasan, dengan tujuan utama untuk memberikan pelayanan yang baik kepada siswa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip teori agensi, kepala sekolah sebagai agen bertindak atas nama yayasan sebagai prinsipal. Mekanisme akuntabilitas yang diterapkan oleh Shafta bertujuan untuk mengurangi risiko konflik kepentingan antara manajemen dan prinsipal, dengan memastikan bahwa kinerja sekolah sejalan dengan tujuan dan kepentingan prinsipal. Evaluasi internal dan laporan kinerja sekolah membantu dalam penilaian kinerja kepala sekolah dan stafnya, sementara pengawasan langsung dari pemilik dan komite memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan oleh kepala sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah yang telah ditetapkan oleh pemilik. Dengan demikian, praktik akuntabilitas yang diterapkan oleh Sekolah Shafta mencerminkan upaya untuk mengelola risiko konflik kepentingan antara agen (kepala sekolah) dan prinsipal (yayasan).

Kemudian berikut merupakan wawancara lanjutan mengenai struktur organisasi shafta sebagai bagian dari efektifitas kepemimpinan :

“**Struktur organisasi kita jelas pembagian tugas dan wewenangnya** dan tidak ada yang merangkap dalam struktur organisasi, setiap jabatan diisi oleh 1 orang yang berbeda”. Berikut dokumentasi struktur organisasi shafta:



Gambar 1. Dokumentasi Struktur Organisasi Shafta

Penerapan prinsip akuntabilitas juga harus memperhatikan struktur organisasi sekolah, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam struktur organisasi pendidikan memegang peranan krusial dalam mendukung akuntabilitas (Susanti, 2020). Melalui struktur yang terdefinisi baik, setiap individu memiliki pemahaman tentang peran dan kontribusi mereka dalam pencapaian tujuan pendidikan (Fahrudin et al, 2021). Dengan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa struktur organisasi di Sekolah Shafta memiliki pembagian tugas dan wewenang yang jelas, serta tidak ada rangkap jabatan antara satu dengan yang lain, sekolah shafta menyoroti aspek positif dalam hal akuntabilitas di dalam lembaga pendidikan. Pembagian tugas dan wewenang yang terdefinisi dengan baik membantu dalam meminimalkan ambiguitas dan potensi konflik dalam organisasi. Setiap individu diorganisasi dapat memahami peran dan tanggung jawab mereka dengan jelas, memungkinkan untuk fokus pada tugas yang telah ditetapkan. Transparansi dan pertanggungjawaban menjadi lebih mudah diimplementasikan, dan efisiensi operasional meningkat karena setiap individu dapat bekerja dengan lebih terfokus tanpa tumpang tindih tugas. Pernyataan tersebut mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang jelas, terstruktur, dan transparan, mendukung prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah.

Tabel 2. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

GCG	Tindakan	Objek
Akuntabilitas	Evaluasi Internal	SDM
	Direct Control	
	Laporan Kinerja	
	Struktur Organisasi yang jelas	

**b. Peningkatan Kinerja dan Hasil Akademik Siswa**

Berdasarkan hasil observasi dan keterangan yang didapatkan penulis tentang strategi yang direncanakan oleh Sekolah Islam Shafta untuk meningkatkan prestasi akademik, non akademik atau peningkatan penerimaan siswa di PTN bereputasi didapatkan pernyataan sebagai berikut :

“Kami biasanya akan **menunjuk beberapa siswa yang memiliki potensi** baik dalam bidang akademik atau non akademik untuk kemudian **di bimbing lebih lanjut oleh guru guru yang berkompeten di bidangnya**. Lalu untuk penerimaan siswa ke PTN, kami hanya mengenalkan siswa ke PTN melalui **kegiatan KTS atau outing class** dengan harapan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar ke perguruan tinggi”

Peningkatan kinerja hasil akademik siswa menjadi salah satu penilaian untuk menilai akuntabilitas sebuah sekolah. Keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan akademik menjadi cermin dari efektivitas pengelolaan, program pembelajaran, dan strategi evaluasi yang diimplementasikan (Fathurrochman, I., et al, 2022; Bafadal, I, 2016; Martinus, 2021). Pernyataan sebelumnya menunjukkan upaya konkret dalam mengimplementasikan akuntabilitas sekolah melalui pendekatan yang berfokus pada pengembangan potensi siswa, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Pertama, melalui penunjukan siswa yang memiliki potensi, sekolah bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada siswanya. Selanjutnya, pendekatan bimbingan oleh guru-guru yang berkompeten menunjukkan komitmen sekolah untuk memastikan pengembangan optimal siswa dalam bidang yang sesuai dengan bakatnya untuk dapat berprestasi. Selain menghasilkan siswa yang berprestasi, Sekolah Islam Shafta juga mendorong siswanya dalam belajar ke jenjang selanjutnya, program yang direncanakan adalah dengan mengenalkan siswa langsung ke PTN melalui program KTS (Kegiatan Tengah Semester) dan outing class untuk belajar langsung ke PTN. Hal ini ternyata berdampak positif terhadap penerimaan siswa ke PTN bereputasi. Secara keseluruhan, pernyataan tersebut mencerminkan kesadaran sekolah terhadap tanggung jawab sekolah untuk memberikan pengembangan holistik kepada siswa. Strategi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas terhadap pencapaian akademik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan prestasi siswa dalam berbagai bidang.

GCG	Tindakan	Objek
Akuntabilitas	Bimbingan Prestasi	Siswa

### c. Publikasi Informasi Sekolah

Berdasarkan hasil observasi dan keterangan yang didapatkan penulis tentang media publikasi yang digunakan oleh sekolah islam shafta didapatkan pernyataan sebagai berikut :

“Shafta ada **beberapa media untuk publikasi kegiatan** atau promosi, biasanya paling sering memakai instagram, website, dan kalau youtube itu untuk kegiatan besar dan profile sekolah saja” . Berikut dokumentasi media shafta :

Pada dasarnya sebuah organisasi harus memberikan informasi yang sesuai dan dapat dimengerti oleh *stakeholder*. Sekolah seharusnya mempublikasikan kegiatan, fasilitas, dan keunggulannya sebagai bagian dari praktik transparansi (Trismanto Trismanto & Zainal Alim Adiwijaya, 2012; Syerlie Annisa et al., 2021). Informasi yang tersedia secara terbuka membantu calon siswa dan orang tua untuk membuat keputusan informasi tentang kecocokan sekolah dengan kebutuhan dan harapan mereka. Selain itu, transparansi dalam menyediakan informasi juga membangun kepercayaan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, serta berfungsi sebagai alat promosi yang efektif untuk menarik perhatian dan membangun citra positif bagi sekolah (Trismanto Trismanto & Zainal Alim Adiwijaya, 2012; Syerlie Annisa et al., 2021). Pernyataan sebelumnya mengindikasikan bahwa Shafta telah mengadopsi berbagai media, seperti Instagram, website, dan YouTube, untuk publikasi kegiatan atau promosi, hal ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi. Penggunaan Instagram, sebagai platform berbagi foto dan video, memberikan kesempatan untuk memberikan gambaran



visual tentang kegiatan sekolah sehari-hari. Website menjadi saluran informasi yang lebih formal dan terorganisir, memungkinkan sekolah untuk menyajikan informasi secara terstruktur tentang kegiatan, fasilitas, dan profil sekolah. Sementara itu, penggunaan YouTube untuk mendokumentasikan kegiatan tertentu dan profil sekolah dapat meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap shafta. Keputusan untuk menggunakan berbagai media ini menunjukkan transparansi sekolah dalam menyediakan informasi yang beragam dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi diperkuat dengan pemanfaatan platform media sosial, memastikan bahwa berbagai pihak, termasuk calon siswa dan orang tua, dapat memperoleh gambaran yang holistik tentang kehidupan sekolah.

GCG	Tindakan	Objek
Transparansi	Publikasi Kegiatan	Siswa dan SDM

**d. Pelaporan Keuangan Sekolah**

Berdasarkan hasil observasi dan keterangan yang didapatkan penulis tentang pelaporan keuangan sekolah islam shafta didapatkan pernyataan sebagai berikut: “laporan keuangan operasional **tidak dipublikasikan ke eksternal karena dari internal tidak berkenan**, tetapi untuk informasi keuangan lain seperti **hasil donasi kita publikasikan** di web atau instagram”. Berikut dokumentasinya :



Pada dasarnya sebuah organisasi harus memberikan informasi yang sesuai dan dapat dimengerti oleh stakeholder. Dalam konteks pendidikan, sekolah harus terbuka terkait informasi tentang aktivitas yang dilakukan, seperti pengelolaan keuangan yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, dalam laporan keuangan tersebut harus memberikan informasi terkait perolehan dana, baik dana spp, dana bantuan operasional, atau dana dana lain (Martinus, 2021). Pernyataan sebelumnya menyatakan bahwasannya terkait laporan keuangan operasional, memiliki sifat internal dan hanya diketahui oleh pihak yayasan. Namun, sebagai langkah transparansi yang lebih terbuka, sekolah memberikan informasi terkait penggalangan donasi, seperti donasi untuk bencana korban cianjur melalui media sosial, termasuk jumlah dana yang terkumpul dan cara penyaluran dana tersebut. Dari data yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan, Sekolah Islam Shafta masih belum menunjukkan transparansi terkait dengan informasi laporan keuangan internal mengenai penggunaan dana spp, dana infaq, uang gedung, dan uang kegiatan. Oleh karena itu, terdapat potensi untuk meningkatkan tingkat transparansi terutama dalam hal pengelolaan dana operasional sekolah.

GCG	Tindakan	Objek
Transparansi	Laporan Donasi	Siswa

**e. Keselamatan dan Kesehatan Siswa**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis tentang sarana dan prasarana yang disediakan sekolah islam shafta dalam menjaga kesehatan dan keselamatan siswa didapatkan pernyataan sebagai berikut :

“Sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk menjaga siswa, kami **menyediakan klinik shafta** bagi siswa yang membutuhkan pengobatan, lalu untuk keamanan kami **memasang CCTV** di beberapa area dan kelas **serta menyediakan security** untuk menjaga keamanan sekolah. Kami juga menerapkan kebijakan bagi siswa yang belum memiliki SIM **dilarang untuk membawa sepeda motor**, sebab menurut kami siswa yang tidak memiliki SIM belum siap di jalan”

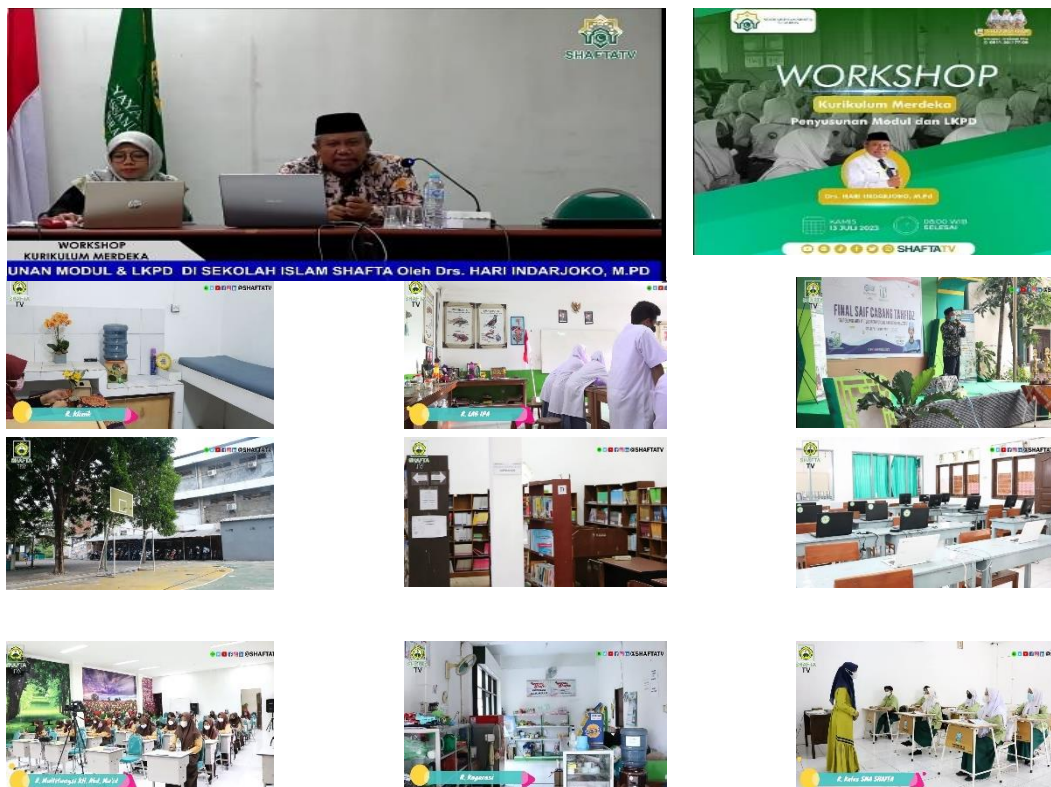
Pengelolaan organisasi pendidikan dibutuhkan tanggung jawab untuk menghasilkan output yang berkualitas. Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kesehatan siswa siswinya dalam proses belajar di sekolah agar proses belajar dapat berjalan dengan seharusnya (Martinus, 2021). Pernyataan sebelumnya mencerminkan tanggung jawab sekolah terhadap kesehatan dan keamanan siswa dengan menyediakan fasilitas klinik dan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan tertentu. Penyediaan klinik Shafta sebagai fasilitas kesehatan menunjukkan tanggung jawab sekolah untuk memberikan layanan medis bagi siswa atau guru yang membutuhkan perawatan. Pemasangan CCTV di beberapa area dan kelas, serta penyediaan personel keamanan, adalah upaya konkret dalam menjaga keamanan sekolah. Langkah-langkah ini memberikan tingkat perlindungan yang lebih baik terhadap potensi risiko keamanan dan memperkuat citra sekolah sebagai lingkungan yang aman dan terkendali. Kebijakan yang mewajibkan siswa memiliki SIM sebelum membawa sepeda motor menunjukkan kesadaran sekolah terhadap risiko keselamatan di jalan raya. Kebijakan ini menciptakan tanggung jawab sekolah untuk mengamankan siswa dari potensi kecelakaan dan menunjukkan perhatian terhadap kesiapan siswa dalam mengendarai sepeda motor. Secara keseluruhan, pernyataan tersebut menciptakan gambaran bahwa sekolah islam shafta tidak hanya fokus pada aspek pendidikan, tetapi juga mengambil tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kesehatan siswa siswinya. Tindakan yang diambil sekolah ini bersifat preventif dan dapat menciptakan lingkungan yang baik dalam proses belajar siswa.

GCG	Tindakan	Objek
Responsibilitas	K3	Siswa dan SDM

**f. Kualitas Pendidikan yang Mumpuni**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis terkait proses kualitas pendidikan yang diberikan oleh Sekolah Islam Shafta kepada siswanya didapatkan pernyataan sebagai berikut:

“Banyak aspek untuk menjaga kualitas pendidikan di Shafta, **pertama dari segi kualitas guru** kita menjangkau guru dengan kualitas bagus dari kampus terbaik dan bahkan ada beberapa yang berpendidikan S2, **kedua dari segi pengembangan kualitas guru** kami mengadakan workshop seperti penyusunan modul LKPD, **ketiga dari segi fasilitas** kami menyediakan kelas, laboratorium, lapangan, koperasi, kantin, ekstrakurikuler dan banyak lainnya untuk menunjang proses belajar siswa”. Berikut beberapa dokumentasi sarpras dan workshop shafta :



Pengelolaan organisasi pendidikan dibutuhkan tanggung jawab untuk menghasilkan output yang berkualitas. Tanggung jawab dari sebuah organisasi pendidikan dapat dilihat melalui kualitas seorang guru yang mendidik secara langsung dan melakukan interaksi dengan siswa dan fasilitas yang diberikan untuk memberikan kenyamanan dalam belajar (Martinus, 2021). Pernyataan sebelumnya mencerminkan tanggung jawab yang diemban oleh sekolah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di Shafta. Upaya pertama yang disorot adalah penekanan pada kualitas guru, dengan strategi mendapatkan tenaga pengajar dari kampus-kampus terbaik dan bahkan beberapa yang berpendidikan S2. Langkah ini menciptakan fondasi yang kuat untuk pengajaran yang berkualitas, Sekolah Islam Shafta percaya bahwa kualitas guru berperan krusial dalam pengalaman belajar siswa. Upaya kedua, yaitu pengembangan kualitas guru melalui workshop, khususnya dalam penyusunan modul LKPD, menunjukkan komitmen sekolah untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pengajar. Workshop ini menciptakan kesempatan bagi guru-guru untuk terus berkembang, mengikuti tren pendidikan terkini, dan menyusun materi pembelajaran yang berkualitas. Hal ini mencerminkan tanggung jawab sekolah untuk menjaga agar tenaga pengajar berkembang dalam praktik pengajaran dan mampu menyediakan pengalaman belajar yang efektif. Upaya ketiga, yaitu hal yang berkaitan dengan fasilitas yang disediakan oleh sekolah, menunjukkan tanggung jawab sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan lengkap. Secara keseluruhan, sekolah Shafta mengenali kompleksitas faktor yang berkontribusi terhadap kualitas pendidikan. Dengan merekrut guru berkualitas tinggi, memberikan peluang pengembangan kepada staf pengajar, dan menyediakan fasilitas yang memadai, sekolah menunjukkan tanggung jawab dan dedikasi untuk memberikan pengalaman pendidikan yang optimal bagi siswanya.

CGC	Tindakan	Objek
Responsibilitas	Workshop dan Pelatihan	Guru
	Sarana dan Prasarana	Siswa



**g. Diferensiasi Kurikulum**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis terkait kurikulum pembeda dari sekolah lain, didapatkan keterangan sebagai berikut :

“Unggulan shafta selama ini yaitu **entrepreneurship**, kami selalu mendorong siswa untuk berjiwa wirausaha dengan mengadakan workshop entrepreneurship, praktik ujian yang dikemas untuk berjiwa entrepreneur seperti simulasi pernikahan, dan menciptakan produk inovasi sains. Dalam keagamaan kami ada **program mapel keshaftaan, praktik kultum, doa dan dzikir yang dipimpin oleh siswa** itu sendiri”. Berikut dokumentasinya :



Proses kegiatan belajar mengajar, selain kualitas guru, Kurikulum juga merupakan prinsip penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran, jika prinsip-prinsip tersebut baik dan kuat dapat menjamin kelancaran proses pembelajaran sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai (Setiyadi, Revyta, & Fadhilah, 2020). Sekolah harus memberikan kurikulum yang berkualitas bagi siswanya agar dapat mencapai tujuan pendidikan (Setiyadi, Revyta, & Fadhilah, 2020). Pernyataan kepala sekolah mengenai unggulan Shafta dalam bidang entrepreneurship dan keagamaan mencerminkan tanggung jawab sekolah dalam merancang kurikulum pembeda yang memenuhi kebutuhan dan harapan siswa dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal entrepreneurship, pendekatan yang diterapkan, seperti workshop entrepreneurship, simulasi pernikahan sebagai praktik ujian berjiwa entrepreneur, dan penciptaan produk inovasi sains, menciptakan lingkungan belajar yang mencakup aspek kewirausahaan. Tanggung jawab sekolah ini menunjukkan komitmen dalam membekali siswa dengan keterampilan dan pemahaman yang relevan dengan dunia bisnis dan kewirausahaan. Di sisi keagamaan, keberpihakan Shafta terhadap pendidikan agama tampak dalam program Keshaftaan, praktik kultum, doa, dan dzikir yang dipimpin oleh siswa sendiri. Ini menciptakan tanggung jawab sekolah terhadap pengembangan nilai-nilai keagamaan dan karakter siswa. Program Keshaftaan khususnya menunjukkan perhatian terhadap hafalan doa-doa, dzikir, dan aspek-aspek lain dalam rangka mendukung aspek keagamaan siswa. Tanggung jawab yang dilakukan oleh sekolah shafta ini menciptakan pembeda dalam kurikulum yang diterapkan oleh sekolah lain (Evalin Ndoen & Alberth Supriyanto Manurung, 2021; Martinus, 2021). Sekolah Shafta menunjukkan komitmen untuk memberikan pengalaman pendidikan holistik yang mencakup aspek kewirausahaan dan keagamaan, yang tidak selalu ditemukan di sekolah lain.

GCG	Tindakan	Objek
Responsibilitas	Kurikulum yang berkualitas	Siswa

**h. Kebijakan Sekolah Independen**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis terkait proses penetapan kebijakan atau pengambilan keputusan yang terjadi di Sekolah Islam Shafta, didapatkan keterangan sebagai berikut:

“Seluruh kebijakan atau perencanaan di Sekolah diputuskan oleh **Internal saja**. Dari (manajemen) juga **cenderung mengikuti** untuk dapat persetujuan”

Pada dasarnya sebuah organisasi dalam menjalankan operasionalnya, tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain, harus bebas dari berbagai macam kepentingan dan bebas dari intervensi atau tekanan, sama halnya dalam konteks pendidikan, sekolah harus tegas mengambil keputusan dan bebas intervensi dari pihak yang tidak memiliki kepentingan didalamnya (Martinus, 2021). Begitu juga dengan sekolah islam shafta sebagai institusi pendidikan. Berdasarkan keterangan sebelumnya, Sekolah Islam Shafta tidak melibatkan pihak yang tidak berkepentingan dalam proses pengambilan kebijakan dan hanya melibatkan pihak internal antara yayasan dan kepala sekolah. Namun, dalam hal ini dapat dilihat bahwasannya independensi Agen (manajemen) dalam membuat kebijakan dapat dikatakan belum sepenuhnya independen. Pihak agen harus berkonsultasi dengan prinsipal dan harus mendapatkan persetujuan dari pemilik dalam hal perencanaan atau kegiatan sekolah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya unsur-unsur teori agensi yang tercermin dalam independensi sekolah. Teori agensi menyoroti hubungan agen (guru dan kepala sekolah) dengan pihak pemilik serta pengaruh kebijakan dan keputusan dalam mencapai tujuan organisasi (Erstiawan, 2021). Persetujuan dari pihak yayasan menjadi kunci dalam pelaksanaan kegiatan yang menandakan ada ketidakpercayaan penuh dari pemilik kepada manajemen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, independensi sekolah dalam menetapkan kebijakan sudah baik dan tidak terintervensi oleh pihak luar. Namun, independensi kepala sekolah dalam membuat kebijakan masih dipengaruhi oleh prinsipal.

GCG	Tindakan	Objek
Independensi	Bebas Intervensi Eksternal	SDM

**i. Penerimaan Siswa yang Adil**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis terkait proses penerimaan siswa di Sekolah Islam Shafta, didapatkan keterangan sebagai berikut ini :

“**Proses penerimaan siswa dilakukan melalui tes psikotes, wawancara dan tes baca tulis Al-Quran**. Kami menyediakan beberapa beasiswa bagi anak yang berprestasi bidang tahfidz, akademik dan non akademik berupa potongan uang gedung, dan SPP Kami juga memberikan beasiswa full khusus bagi anak yatim piatu agar mereka bisa bersekolah”

*Fairness* dalam konteks pendidikan adalah tidak membeda-bedakan penerimaan siswa berdasarkan suku dan ras, semua proses penerimaan didalam sekolah didasarkan pada kemampuan dan proposi masing masing individu (Martinus, 2021). Pernyataan sebelumnya menunjukkan usaha untuk menciptakan proses penerimaan siswa yang adil di Shafta. Penggunaan tes psikotes, wawancara, dan tes baca tulis Al-Quran sebagai kriteria penilaian memberikan variasi yang mencakup aspek psikologis, keterampilan interpersonal, dan kemampuan keagamaan siswa. Hal ini dapat dianggap sebagai upaya untuk memahami dan menilai berbagai potensi dan kemampuan siswa, tidak hanya berfokus pada aspek akademis. Adanya beasiswa bagi siswa berprestasi di bidang tahfidz, akademik, dan non akademik, dengan bentuk potongan uang gedung dan SPP, menciptakan peluang yang lebih luas bagi siswa untuk mengakses pendidikan di Shafta. Ini mencerminkan keadilan dalam memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan keunggulan dalam berbagai bidang, tidak hanya pada prestasi akademis.

Pemberian beasiswa khusus bagi anak yatim piatu juga menunjukkan kepedulian sekolah terhadap inklusivitas dan kesetaraan akses pendidikan, menciptakan lingkungan yang berusaha memberikan peluang yang sama kepada semua siswa, terlepas dari latar belakang atau kondisi sosial mereka. Dengan demikian, pernyataan kepala sekolah menunjukkan upaya untuk menciptakan proses penerimaan dan kebijakan beasiswa yang adil, mendukung nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan.

GCG	Tindakan	Objek
Fairness	Tes Psikotes, Wawancara dan Baca Tulis Al-Quran	Siswa

**j. Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Adil**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis terkait proses pengelolaan sumber daya manusia yang terjadi di Sekolah Islam Shafta, didapatkan pernyataan sebagai berikut :

“Proses promosi jabatan (dalam struktur organisasi) **didasarkan pada kinerja selama menjadi guru**. Dasar utama penilaian kinerja guru yaitu **motivasi bekerja, kompetensi, kedisiplinan, dan kepatuhan**. Kita setiap bulan memberikan apresiasi kepada guru/staff yang memiliki kinerja terbaik berupa sertifikat penghargaan pegawai terbaik dan bonus”



Prinsip fairness dalam institusi pendidikan tidak hanya dilihat dari proses penerimaan siswa yang adil, tetapi juga pihak sekolah harus memberikan kesempatan yang sama kepada para guru untuk mendapatkan posisi yang layak sesuai dengan kapabilitas individu (Martinus, 2021). Berdasarkan pernyataan sebelumnya, proses promosi jabatan didasarkan pada kinerja yang solid selama menjadi guru, dengan kriteria penilaian yang jelas, seperti motivasi bekerja, kompetensi, kedisiplinan, dan kepatuhan. Kompetensi seorang pengajar disini dinilai berdasarkan kesesuaian latar belakang pendidikan dengan bidang yang diajarkan, dan banyaknya prestasi siswa yang dihasilkan dari bidang yang diajarkan. Setiap bulan, pengakuan atas kinerja terbaik diberikan kepada guru dan staf dalam bentuk sertifikat penghargaan dan bonus. Pendekatan ini mencerminkan komitmen terhadap keterbukaan dan transparansi, serta memberikan insentif yang adil bagi semua staf untuk mencapai standar yang ditetapkan. Dengan demikian, Shafta menegaskan bahwa keadilan adalah pondasi utama dalam memotivasi para guru dan meningkatkan kinerja terbaik mereka.

Kemudian, berikut hasil wawancara lanjutan mengenai proses penentuan kepala sekolah di Sekolah Islam Shafta :

"Kurang lebih sama, cuman kalau kepala sekolah dilihat juga **jiwa leadershipnya dan harus satu visi dengan yayasan**. Kepala sekolah dipilih setiap 5 tahun sekali oleh yayasan, tapi kalo sebelum 5 tahun itu dirasa kurang ya akan diganti"

Hasil wawancara lanjutan mengungkapkan bahwa dalam proses penentuan kepala sekolah di Sekolah Islam Shafta, selain dari kriteria kinerja dan kompetensi, juga dipertimbangkan jiwa kepemimpinan dan kesesuaian visi dengan yayasan. Kepala sekolah dipilih setiap 5 tahun sekali oleh yayasan, namun keputusan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh evaluasi kinerja di tengah periode tersebut. Analisis dari sisi prinsip fairness menunjukkan pendekatan ini memberikan kesempatan bagi kepala sekolah yang efektif untuk memimpin dalam jangka waktu yang cukup untuk mencapai perubahan yang signifikan, sambil tetap memperhatikan kemungkinan untuk mengganti kepala sekolah jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan. Dengan demikian, prinsip fairness di Shafta tercermin dalam upaya untuk memberikan kesempatan yang adil bagi kepala sekolah untuk membuktikan diri mereka, sambil tetap memastikan bahwa kepemimpinan sekolah selalu sejalan dengan visi dan misi yayasan.

Berikut merupakan ringkasan Good School Governance dari Sekolah Islam Shafta :

<b>Good School Governance</b>			
	Input	Proses	Output
<b>T</b>	Donasi	Publikasi Informasi Menggunakan Web dan Media Sosial	Laporan Keuangan
	Program Yang Berkualitas		Transparansi Program
<b>A</b>	SDM Yang Berkualitas	Direct Control Laporan Kinerja Evaluasi Internal Struktur Organisasi yang Jelas	Lingkungan Manajemen Efektif
<b>R</b>	Guru Yang Berkualitas Siswa Yang Berkualitas	Workshop dan Pelatihan Kurikulum Berkualitas Pengadaan Sarana dan Prasarana	Peningkatan Prestasi Siswa
		K3	
<b>I</b>	Manajemen Berintegritas	Persetujuan dan Arahan Prinsipal	Manajemen Kreatif
<b>F</b>	Siswa	Tes Psikotes, Wawancara dan Tes Baca Tulis Al-Quran	Siswa Yang Berkualitas
	SDM Yang Berkualitas	Sistem Reward and Punsihment	Pegawai Yang Berprestasi

Keterangan:

- T = Transparansi
- A = Akuntabilitas
- R = Responsibilitas
- I = Independensi
- F = Fairness

Tabel tersebut menggambarkan komponen-komponen yang dilakukan oleh Sekolah Islam Shafta dalam implementasi Good School Governance, mulai dari pengawasan secara langsung oleh pemilik hingga penerimaan siswa yang adil. Proses-proses tersebut dirancang untuk meningkatkan manajemen dan kualitas dari sekolah. Dengan input yang tepat berupa siswa dan SDM yang unggul, serta penerapan proses yang efektif

maka dapat menghasilkan output berupa peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kinerja SDM, dan menciptakan lingkungan manajemen yang efektif. Melalui implementasi Good School Governance, Shafta diharapkan dapat meningkatkan reputasi sekolah di level nasional atau internasional, serta memberikan manfaat bagi siswa dan masyarakat sekitarnya.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan analisis yang telah diuraikan penulis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasannya *Good School Governance* dan praktik teori agensi yang terjadi di Sekolah Islam Shafta dapat meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik siswa. Bentuk *Good School Governance* Sekolah Islam Shafta diantaranya Sekolah Islam Shafta menerapkan akuntabilitas dengan control secara langsung melalui prinsipal, pembuatan laporan kinerja, evaluasi internal dan memiliki struktur organisasi yang jelas. Sekolah Islam Shafta menggunakan media sosial @shaftatv dan web [www.shafta.sch.id](http://www.shafta.sch.id) sebagai media untuk keterbukaan program. Sekolah Islam Shafta mengimplementasikan responsibilitas dengan mengadakan workshop pengembangan bagi guru, sarana prasarana yang mumpuni, kesehatan dan keselamatan siswa, dan penciptaan kurikulum unggulan seperti entrepreneurship dan program keshaftaan. Sekolah Islam Shafta dalam pengambilan keputusan hanya melibatkan pihak internal dan arahan dari prinsipal atau pemilik. Sekolah Islam Shafta meningkatkan kinerja dari SDMnya menggunakan sistem Reward and Punishment dan untuk menjangkau siswa yang baik, Shafta mengadakan penerimaan berbasis tes yang terdiri dari wawancara, tes psikotes dan baca tulis AL-Quran. Untuk meningkatkan praktik *Good School Governance* (GCG) di Sekolah Islam Shafta, disarankan untuk memperkuat keterlibatan stakeholder seperti wali siswa dalam memberikan proses improvement, memberikan ruang transparansi yang lebih terbuka dan meningkatkan kolaborasi dengan pihak eksternal

## DAFTAR PUSTAKA

- Alifah, S. (2021). Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Untuk Mengejar Keteringgalan Dari Negara Lain. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 5(1), 113. [https://doi.org/10.36841/cermin\\_unars.v5i1.968](https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v5i1.968)
- Annisa, S., Azizah, J., & Tambunan, L. (2021). Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Web Dalam Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas. *SATIN-Sains dan Teknologi Informasi*, 7(2), 44-52.
- Bafadal, I. (2016). Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Pembelajaran Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Sekolah. *Manajemen Pendidikan*, 25(1), 1-9.
- Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (1975). Introduction to qualitative research: A phenomenological approach. *Journal of Phenomenological Psychology*, 6(2), 109-110.
- Dedi Kusmayadi, Dedi Rusdiana, & Jajang Badruzaman. (2015). Pemodelan Tata Kelola Sekolah Yang Baik Pasca Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Di Kota Tasikmalaya. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 5(1). <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/616/0>
- Erstiawan, MS ; Tony Soebijono. (2018). Analisis Good Corporate Governance pada Koperasi (Pendekatan Sistem Informasi Studi Kasus Setia Bhakti Wanita Surabaya). *Develop*, <https://doi.org/10.25139/dev.v2i1.959>.



- Fadhilah, F. N., & Syafruddin, M. (2013). Analisis pengaruh karakteristik corporate governance terhadap kemungkinan financial distress. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(2), 1-15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3319>
- Fathurrochman, I., Adilah, P., Anjriyani, A., & Prasetya, A. Y. (2022). Pengelolaan Manajemen Sekolah Yang Efektif. *E-AmalJurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 1363-1374.
- Faisal, Sanapiah. 2007, *Format-Format penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., and Holmes, S., 2010, *Accounting Theory*, John Wiley and Sons, Australia.
- Gulo, W; Yovita Hardiwati. (2002). *Metodologi penelitian / W. Gulo ; editor Yovita Hardiwati*. Jakarta:Grasindo,.
- Horne, James C. Van, John M. Wachowicz, JR, 2005, *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan (Buku 2)*, Terjemahan oleh Dewi Fitriyani & Deny Arnos Kwary, 2010, Salemba Empat, Jakarta.
- Indri Kismeji Prajayanti, & di, M. (2013). Pengaruh Monitoring Cost Terhadap Kecenderungan Perilaku Perataan Laba. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1634>
- Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3. Hal 305-360.
- Jensen M and W.H. Meckling (1986), “theory of the firm : Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structur” , *Journal of Financial Economics*
- Khairul Akbar, Hamdi ; Lalu Kamarudin ; Fahrudin. (2021, Maret). *Manajemen POAC pada Masa Pandemi Covid -19*. *Jurnal Kependidikan*, 167-175
- Khoirul Wakhid, & Rohmawati Kusumaningtiyas. (2023). Penerapan Dimensi Akuntabilitas pada Yayasan Murni Pendidikan Sosial “Sunan Drajat” Lamongan. *Muttaqien*, 4(2), 127–147. <https://doi.org/10.52593/mtq.04.2.04>
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2019). *Publikasi*. Retrieved from Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia: <https://knkg.or.id>
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, h. 3, 11.
- Martinus Sony Erstiawan. (2021). Good Corporate Governance Penyelenggara Pendidikan Dalam Perspektif Agency Teory. *Majalah Ekonomi*, 26(1), 40–51. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol26.no1.a3952>
- McGuigan, James R., R. Charles Moyer, Frederick H. deB. Harris, 2008, *Economic for Managers*, Thomson South-Western, Canada
- Ndoen, E., & Manurung, A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Balaraja. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3), 1025-1036. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i3.810>
- Pujiono Pujiono, & Made Dudy Satyawan. (2011). Menciptakan Mutu Perguruan Tinggi (Higher Educations) Berskala Internasional Melalui Strategi Penerapan Tata Kelola Universitas Yang Baik (Good University Governance). *Akrual*, 3(1), 59–59. <https://doi.org/10.26740/jaj.v3n1.p59-69>
- Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan, 2008, *Pengantar Keuangan Perusahaan*, Terjemahan oleh Ali Akbar Y., Rafika Yuniasih, & Christine, 2009, Salemba Empat, Jakarta.
- Setiyadi, B., Revyta, R., & Fadhilah, A. (2020). Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum. *Khazanah Pendidikan*, 14(1)
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sudjana, N. (1989). *Penelitian dan Penilaian*. Bandung: Sinar Baru.
- Susanti, H. (2020). Penerapan Good School Governance (GSG) Dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan Bantuan Operasional (BOS) Sekolah Dasar Kota Blitar. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(1), 74-84.
- Titik Handayani. (2016). Korupsi Dan Pembangunan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 4(2), 15–34.  
<https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/183/215>
- Trismanto, T., & Adiwijaya, Z. A. (2012). Tata Kelola Sekolah RSBI Serta Dampaknya Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Masyarakat. *Dinamika Pendidikan*, 7(2).
- Trismanto Trismanto, & Yusak Lestari Diyono. (2014). Good Governance Eks-Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). *Serat Acitya*, 3(1), 1.  
<https://doi.org/10.56444/sa.v3i1.117>
- Wahyuningsih Sri. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*. UTM PRESS
- Wiriaatmadja, Rochiati. 2008. *Metode Penelitian Tindakan Kelas Untuk Meningkatkan Kinerja Guru Dan Dosen*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.